

Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia

Ricco Andhika Hudaya¹, Novan Setiawan², Wildan Akbar³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
63230694@bsi.ac.id, 63230564@bsi.ac.id, 63230905@bsi.ac.id

Abstract

This research examines the influence of per capita income and inflation on Indonesia's income tax revenue. A quantitative method was applied, using secondary data from the Directorate General of Taxes and the World Bank. The study employed a saturated sampling technique, covering annual data from 2010 to 2024 on per capita income, inflation, and tax revenue. Results indicate that per capita income has a positive and significant partial effect on income tax revenue. Inflation also shows a positive and significant partial impact. Together, both variables exert a positive and significant simultaneous effect. These findings suggest that higher societal welfare and stable inflation strengthen the tax base. The study implies that fiscal policies should foster economic growth while maintaining price stability to ensure optimal income tax collection.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterkaitan pendapatan per kapita dan inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan Indonesia. Metode kuantitatif diterapkan dengan menggunakan data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bank Dunia. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, yang mencakup data tahunan dari tahun 2010 hingga 2024 mengenai pendapatan per kapita, inflasi, dan penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh parsial yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Inflasi juga menunjukkan pengaruh parsial yang positif dan signifikan. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dan inflasi yang stabil memperkuat basis pajak. Penelitian ini menyiratkan bahwa kebijakan fiskal harus mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas harga untuk memastikan pengumpulan pajak penghasilan yang optimal.

A. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan dianggap dan diposisikan sebagai kontributor utama yang memberikan kontribusi penting pada penerimaan negara, yang kemudian diperlukan untuk pembiayaan serta pembangunan di berbagai wilayah. Pajak penghasilan diposisikan sebagai kontributor utama dalam *budget* pengelolaan negara, sehingga keberlanjutan penerimaan pajak ini dijadikan perhatian utama oleh pemerintah. Namun, penerimaan pajak penghasilan tidak selalu dapat dipertahankan secara stabil karena dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Pendapatan per kapita masyarakat ditunjukkan sebagai faktor yang paling menentukan, sebab melalui indikator tersebut tingkat kesejahteraan dan kemampuan membayar pajak dapat tercermin. Selain itu, tingkat inflasi juga dijadikan variabel penting yang dapat memengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Apabila tingkat inflasi berada pada kondisi tinggi, daya beli masyarakat akan dilemahkan, nilai konsumsi akan berkurang, dan basis pajak akan diperempit. Sebaliknya, apabila inflasi dapat dikendalikan, pertumbuhan ekonomi akan didorong sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Dengan demikian, hubungan yang kompleks pada tiga faktor utama antara pendapatan per kapita, inflasi, dan penerimaan pajak penghasilan ditunjukkan melalui kondisi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian diarahkan untuk mengetahui sejauh mana kedua variabel tersebut memengaruhi pemasukan negara yaitu pajak penghasilan.

Pada rentang waktu 2010 sampai 2024, perekonomian Indonesia menjumpai berbagai dinamika yang cukup signifikan. Pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat menunjukkan pola yang fluktuatif, mencerminkan adanya

Article Received:

November 24th, 2025

Article Revised:

November 30th, 2025

Article Published:

December 1st, 2025

Keywords:

Per Capita Income, Income Tax Revenue, Inflation Rate

Correspondence:

63230694@bsi.ac.id

Artikel Diterima:

24 November 2025

Artikel Revisi:

30 November 2025

Artikel Dipublikasi:

1 Desember 2025

Kata Kunci:

Pendapatan Per kapita, Penerimaan Pajak Penghasilan, Tingkat Inflasi

Korespondensi:

63230694@bsi.ac.id

perubahan dalam tingkat kesejahteraan dan daya beli. Di sisi lain, tingkat inflasi juga mengalami pergerakan yang dipengaruhi oleh faktor domestik seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta faktor global seperti harga komoditas dunia dan kondisi perdagangan internasional. Kombinasi dari kedua variabel makroekonomi ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan penerimaan negara tetap optimal. Perubahan yang terjadi selama periode tersebut melahirkan masalah yang kompleks bagi penerimaan Pajak Penghasilan, karena pajak ini sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam menghasilkan pendapatan. Ketika pendapatan perkapita meningkat, potensi penerimaan pajak penghasilan juga bertambah, namun inflasi yang menjulang dapat menekan volume transaksi dan mengurangi basis pajak. Maka, diperlukan kajian mendalam guna memahami bagaimana interaksi antara pendapatan perkapita dan tingkat inflasi memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. Analisis secara komprehensif dapat membantu merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan optimalisasi penerimaan pajak.

Berbagai penelitian telah memberikan temuan yang berbeda jika membahas pengaruh pendapatan per kapita dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Oleh Salawali (2021) serta Prabowo & Wijaya (2023) ditarik hasil pendapatan per kapita tidak berkontribusi secara positif terhadap penerimaan pajak penghasilan serta penerimaan pajak negara. Sebaliknya, pengaruh positif pendapatan per kapita atas penerimaan pajak penghasilan ditunjukkan melalui hasil pengkajian yang dikemukakan oleh (Isnanto *et al.*, 2022). Adapun oleh Sabyan *et al.* (2022) mengungkapkan pendapatan perkapita memiliki kontribusi positif atas penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sementara itu, pada Anggraini (2022) serta Luciana & Ngadiman (2021) diungkapkan fakta kalau tingkat inflasi tidak memberi dampak positif atas penerimaan pajak penghasilan. Lain halnya dari studi yang dilakukan oleh Monica & Kunawangsih (2023) dimana ditegaskan bahwa inflasi memengaruhi secara positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Lalu hasil dari Amaludin & Romadhina (2023) menjelaskan bahwasanya inflasi memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak daerah. Dengan adanya perbedaan hasil dari berbagai penelitian tersebut, ditunjukkan bahwa topik ini masih dianggap relevan serta penting untuk dikaji lebih mendalam.

Penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki sejumlah keterbatasan, terutama terkait ketersediaan data, lingkup wilayah, serta minimnya kajian simultan terkait keterkaitan pendapatan per kapita dan inflasi atas penerimaan pajak penghasilan. Sebagian studi hanya menyoroti satu variabel atau menggunakan periode penelitian yang relatif singkat, sehingga belum mampu memberikan gambaran utuh mengenai keterkaitan keduanya dalam skala nasional. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan memanfaatkan data makroekonomi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan World Bank, serta menganalisis secara bersamaan keterkaitan pendapatan per kapita dan inflasi atas penerimaan pajak penghasilan. Metode regresi linier berganda digunakan agar hasil yang diperoleh lebih menyeluruh dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung parsial. Tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih tepat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penerimaan pajak penghasilan dapat terus bertumbuh dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Disamping itu, temuan ini diharapkan menjadi rujukan oleh akademisi serta praktisi guna memahami hubungan variabel makroekonomi dengan penerimaan pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini telah diformulasikan dengan cakupan yang meliputi: pertama, apakah oleh pendapatan per kapita dapat ditimbulkan pengaruh positif serta signifikan secara sebagian terhadap penerimaan pajak penghasilan; kedua, apakah oleh tingkat inflasi dapat diberikan pengaruh positif serta signifikan secara sebagian terhadap penerimaan pajak penghasilan; lalu ketiga, apakah oleh pendapatan per kapita bersama dengan tingkat inflasi dapat diproyeksikan pengaruh positif serta signifikan secara bersamaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Adapun rancangan struktur penulisan artikel diorkestrasi ke dalam sejumlah segmen, yakni bagian pengantar, telaah pustaka beserta perumusan hipotesis, rancangan metodologis penelitian, hasil yang diperoleh beserta eksposisi pembahasan, serta bagian penutup yang diisi dengan simpulan dan rekomendasi.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Menurut Jensen & Meckling (1976) terkait hubungan keagenan terjadi ketika principal membuat kontrak dengan agent untuk melaksanakan tugas tertentu dengan sebagian keputusan yang dilimpahkan. Dalam teori agensi, terdapat interaksi antara pemberi wewenang dan penerima wewenang dalam menjalankan peran masing-masing. Namun, agent tidak selalu bertindak sepenuhnya demi kepentingan principal karena adanya potensi perbedaan tujuan. Dalam konteks perpajakan, pemerintah bertindak sebagai pihak yang berwenang mengelola penerimaan pajak, sementara wajib pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak. Teori ini menekankan adanya potensi konflik kepentingan, dimana wajib pajak cenderung meminimalkan beban pajak, sedangkan pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak. Konflik kepentingan tersebut dapat diminimalisasi melalui regulasi, transparansi, dan sistem pengawasan yang baik. Dengan adanya kebijakan fiskal yang jelas serta sistem administrasi pajak yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan dalam konteks pembayaran pajak. Hal ini melandasi optimalisasi penerimaan pajak penghasilan.

Keynes Theory

Keynes Theory menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter (Luciana & Ngadiman, 2021). Dalam teori ini, pajak dipandang sebagai instrumen penting untuk mengendalikan permintaan agregat dan menjaga stabilitas ekonomi. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi dan investasi, sehingga memperluas basis pajak penghasilan. Selain itu, Keynes menekankan bahwa inflasi yang terkendali dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dengan demikian, pendapatan per kapita dan tingkat inflasi memiliki keterkaitan erat dengan penerimaan pajak penghasilan, karena keduanya memengaruhi daya beli, konsumsi, dan aktivitas produksi yang menjadi sumber pajak.

Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita telah diposisikan sebagai salah tolak ukur utama esensial dalam ranah ekonomi, dimana rerata penghasilan yang diperoleh bagi setiap individu dalam sebuah negara pada kurun periode tertentu diperlihatkan melalui perhitungan yang dilakukan dengan cara membagi Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah penduduk. Peningkatan pendapatan per kapita menggambarkan peningkatan kemampuan warga negara dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga mencerminkan kesejahteraan ekonomi suatu negara (Prabowo & Wijaya, 2023). Oleh Susila & Pradhani (2022) ditegaskan bahwa pendapatan per kapita tidak semata-mata dijadikan refleksi kemakmuran, melainkan juga difungsikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Negara-negara yang memiliki PDB perkapita tinggi biasanya ditandai dengan kualitas hidup yang lebih unggul, akses pendidikan serta layanan kesehatan kian luas, dan derajat kemiskinan yang kian rendah. Dengan demikian, peningkatan pendapatan per kapita telah dijadikan salah satu orientasi utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Dalam kaitannya dengan sistem perpajakan, keterhubungan erat antara pendapatan per kapita dan potensi penerimaan pajak telah ditunjukkan, sebab ketika penghasilan masyarakat meningkat maka kemampuan mereka untuk menunaikan kewajiban pajak turut diperbesar. Kondisi tersebut memberikan implikasi positif terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak penghasilan, sehingga pertumbuhan pendapatan per kapita dapat dipandang sebagai salah satu determinan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

Tingkat Inflasi

Inflasi telah dipahami sebagai keadaan ketika harga suatu produk mengalami eskalasi dengan cara menyeluruh serta berkesinambungan selama jangka waktu tertentu. Kondisi inflasi tersebut berada pada tingkat moderat dapat dianggap sebagai bagian dari proses ekonomi yang wajar, namun apabila inflasi terlalu tinggi atau tidak terkendali, hal tersebut dapat menekan daya beli masyarakat serta menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian (Mahendra *et al.*, 2024). Karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan moneter. Menurut Amelia & Kunawangsi (2023), Faktor utama yang memicu inflasi telah diidentifikasi sebagai *demand-pull*, yakni ketika permintaan agregat melampaui kapasitas produksi, serta *cost-push*, yang muncul akibat peningkatan biaya produksi seperti kenaikan upah maupun harga bahan baku. Selain itu, ekspektasi terhadap inflasi juga dapat memengaruhi perilaku masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi. Tingkat inflasi memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan. Ketika inflasi berada pada level tinggi, nilai riil pendapatan masyarakat menurun sehingga kemampuan mereka untuk membayar pajak ikut berkurang. Inflasi juga berpotensi menimbulkan distorsi dalam sistem perpajakan, terutama jika tarif pajak tidak menyesuaikan dengan perubahan harga. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas inflasi menjadi hal yang krusial agar sistem perpajakan tetap berjalan efektif dan penerimaan negara dapat terjaga secara optimal.

Penerimaan Pajak Penghasilan

Pada Hakikatnya pajak penghasilan telah ditempatkan sebagai salah satu pilar utama dalam konstruksi penerimaan negara, dimana pengenaan dilakukan atas pendapatan yang diperoleh individu maupun badan usaha dari berbagai sumber. Besarnya penerimaan dianggap sangat dipengaruhi oleh dinamika makroekonomi, seperti pertumbuhan, tingkat pendapatan, dan kestabilan harga, sehingga pada saat ekspansi ekonomi terjadi, basis pajak dapat diperluas dan penerimaan cenderung meningkat (Sinurat, 2023). Sebaliknya, pada saat terjadi resesi atau inflasi yang tinggi, penerimaan pajak dapat menurun akibat melemahnya daya beli dan berkurangnya aktivitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, optimalisasi penerimaan masih dihadang oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, dominasi sektor informal, serta keterbatasan administrasi fiskal (Septian & Anis, 2024). Oleh karena itu, diperlukan reformasi perpajakan yang komprehensif, mencakup perbaikan sistem pelaporan, penguatan pengawasan, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak semakin tinggi.

Pengaruh Pendapatan Per kapita Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak penghasilan, bila ditinjau melalui lensa teori keagenan, mencerminkan relasi kontraktual yang sarat asimetri informasi antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar pula ekspektasi fiskal yang ditransfer dalam bentuk

pajak, sejalan dengan prinsip *ability to pay* yang menjustifikasi peningkatan kapasitas kontribusi. Namun, dalam kerangka keagenan, potensi *agency problem* muncul ketika penggunaan dana pajak tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan masyarakat, sehingga legitimasi fiskal bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Dengan demikian, keterhubungan positif antara pendapatan dan penerimaan pajak bukan hanya sekadar kalkulasi ekonomi, melainkan juga sebuah mekanisme pengikat kepercayaan yang menuntut pemerintah untuk mengurangi *agency cost* melalui tata kelola yang berintegritas. Dalam studi yang dilakukan oleh Isnanto *et al.* (2022) menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sementara itu, oleh Salawali (2021) menyatakan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan uraian terkait *grand theory* yang digunakan serta hasil *review* penelitian terdahulu diajukan hipotesis sebagai berikut; H₁: Diduga pendapatan perkapita tidak berpengaruh Positif dan Signifikan Secara Parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan; dan H₁: Diduga pendapatan perkapita berpengaruh Positif dan Signifikan Secara Parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

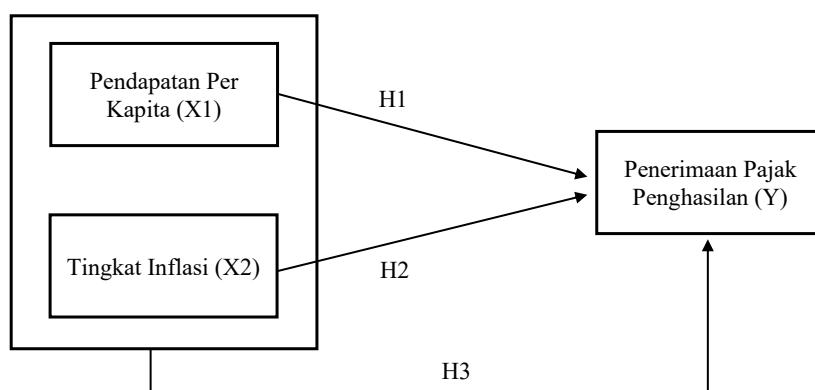
Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Dalam kerangka Keynesian, inflasi berlebih mengikis daya beli, menekan konsumsi riil, dan mereduksi basis pajak penghasilan karena laba korporasi tergerus oleh eskalasi biaya produksi. Sebaliknya, inflasi moderat menjaga keseimbangan permintaan agregat, menopang produksi, dan memastikan arus fiskal tetap berdaya guna. Oleh sebab itu, kapasitas pemerintah mengendalikan inflasi melalui instrumen fiskal dan moneter menjadi determinan utama keberlanjutan penerimaan pajak penghasilan serta legitimasi sistem perpajakan sebagai penopang pembiayaan negara. Pada kajian yang dilakukan oleh Anggraini (2022) serta Luciana & Ngadiman (2021) diungkapkan fakta bahwa tingkat inflasi tidak memberi pengaruh positif atas penerimaan pajak penghasilan. Lain halnya dari studi yang dilakukan oleh Monica & Kunawangsih (2023) dimana ditegaskan bahwa inflasi memengaruhi secara positif terhadap penerimaan pajak penghasilan, Berdasarkan uraian terkait *grand theory* yang digunakan serta hasil *review* penelitian terdahulu diajukan hipotesis sebagai berikut; H₂: Diduga tingkat inflasi tidak berpengaruh Positif dan Signifikan Secara Parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan; H₂ : Diduga tingkat inflasi berpengaruh Positif dan Signifikan Secara Parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan

Pengaruh Pendapatan Per kapita dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pendapatan per kapita dan tingkat inflasi memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak penghasilan, yang dapat dijelaskan melalui teori keagenan dan teori Keynes. Dalam perspektif teori keagenan, masyarakat sebagai *principal* menanggung kewajiban pajak sesuai kemampuan ekonominya, sementara pemerintah sebagai *agent* bertugas mengelola penerimaan tersebut; semakin tinggi pendapatan per kapita maka kontribusi fiskal meningkat, namun inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli sehingga menimbulkan potensi *agency problem* bila pemerintah tidak mampu menjaga kepercayaan publik. Sementara itu, menurut teori Keynes, inflasi yang terkendali akan menjaga stabilitas permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga basis pajak penghasilan tetap kuat, sedangkan inflasi berlebihan justru melemahkan konsumsi dan laba perusahaan yang berujung pada penurunan penerimaan pajak. Dengan demikian, kombinasi pendapatan per kapita dan inflasi menjadi faktor penting yang menuntut pemerintah mengelola kebijakan fiskal secara transparan dan efektif agar penerimaan pajak tetap optimal. Berdasarkan uraian terkait *grand theory* yang digunakan serta diajukan hipotesis sebagai berikut; H₃: Diduga pendapatan perkapita dan tingkat inflasi tidak berpengaruh Positif dan Signifikan Secara Simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan; H₃: Diduga pendapatan perkapita dan tingkat inflasi berpengaruh Positif dan Signifikan Secara Simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan

Gambar 1. Kerangka hipotesis



C. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Analisis kuantitatif deskriptif diaplikasikan dalam penelitian ini dengan pemanfaatan perangkat lunak SPSS versi 30, sedangkan data yang digunakan bersifat sekunder, yakni informasi yang sebelumnya telah dihimpun dan dipublikasikan oleh otoritas pemerintah maupun institusi resmi (Ariyudi et al., 2025). Pemanfaatan data sekunder memberikan keuntungan dari sisi efisiensi, karena peneliti tidak perlu melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Jenis data sekunder yang digunakan mencakup informasi besaran nilai dari tiap variabel yang akan ditinjau dan dilihat pada kurun waktu 2010–2024. Seluruh data yang tersedia telah dieksaminasi dengan pendekatan regresi linear berganda, sehingga keterkaitan antar variabel dapat diidentifikasi dan pengaruh timbal baliknya dapat ditampakkan.

Populasi dan Sampel

Populasi untuk studi ini berupa data *time series* pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia selama periode 2010–2024, jumlah data secara keseluruhan ada 15 data masing-masing variabel, yang jika dihitung pervariabel jumlahnya ada 45 data. Metode penentuan sampel dalam studi ini yaitu metode sampling jenuh, sebuah kategori dari *non probability sampling*. Sugiono mendefinisikannya sebagai berikut “Teknik sampling jenuh di definisikan sebagai teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi sebagai sampel” (Harahap, 2023). Mengingat populasi yang diteliti tergolong terbatas, maka teknik sampling jenuh yang terpilih maka dari itu dijadikan seluruh elemen populasi dijadikan sampel. Dalam riset ini, data sampel yang terhimpun mencakup rentang 15 tahun (2010–2024) dengan total 45 data yang kemudian dieksaminasi.

Teknik Penghimpunan Data

Teknik penghimpunan data dalam studi ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi diterapkan guna memahami fenomena yang berkaitan dengan kondisi makroekonomi dan penerimaan pajak penghasilan secara umum. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari sumber resmi, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan *World Bank*, sehingga data yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur berupa teori, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, guna memperkuat pondasi konseptual serta memberikan konteks akademik terhadap variabel yang diteliti. Kombinasi ketiga teknik ini diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif dan mendukung analisis empiris secara lebih mendalam.

Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini telah diikutsertakan tiga variabel pokok. Rincian ketiga variabel disajikan melalui tabel berikut:
Tabel. 1 Operasional Variabel

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala Pengukuran
Pendapatan Per kapita	Rata-rata penghasilan yang diperoleh individu di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat (Salawali, 2021).	Jumlah Pendapatan Per kapita Tahunan (dalam rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan per kapita setiap tahunnya.	Skala Rasio (Numerik Kontinu)
Tingkat Inflasi	Kondisi ketika harga suatu produk mengalami eskalasi dengan cara menyeluruh serta berkesinambungan selama jangka waktu tertentu (Ambarwati & Rispanty, 2025).	Presentase Inflasi perbulan dan Presentase Inflasi pertahun.	Skala Rasio (Presentase)
Penerimaan Pajak Penghasilan	Total akumulasi penerimaan negara yang bersumber dari pungutan atas penghasilan individu maupun badan usaha dalam satu tahun fiskal telah dijadikan ukuran fiskal utama untuk menilai kontribusi sektor pajak terhadap kas negara (Dasuki, 2022).	Total penerimaan pajak penghasilan tahunan (dalam rupiah).	Skala Rasio (Numerik Kontinu)

Sumber: Hasil uji Peneliti (2024)

Teknik Analisis Data

Rangkaian pengujian kuantitatif yang meliputi, Uji Analisis Statistik Deskriptif. Lalu Uji normalitas, Uji multikolinearitas, Uji autokorelasi, dan Uji heteroskedastisitas yang dimana merupakan rangkaian dari uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis mencakup uji t, uji f serta uji koefisien determinasi, yang dijalankan dengan dukungan perangkat lunak statistik SPSS versi 30, sehingga rumusan masalah dapat dijawab sekaligus hipotesis diuji.

D. HASIL DAN DISKUSI

Analisis Hasil Uji Statistik Deskriptif

“Karakteristik data berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi telah digambarkan melalui menu *Analyze-Descriptive Statistic*, dimana analisis deskriptif difungsikan untuk merangkum serta menyajikan data agar lebih mudah ditafsirkan” (Ayem *et al.*, 2021).

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pendapatan Per Kapita	15	27868531.25	78094433.43	51098495.0939	15605479.63606
Tingkat Inflasi	15	1.56	6.97	4.1287	1.64786
Penerimaan Pajak Penghasilan	15	357045.00	1139783.70	680860.9240	228612.39515
<i>Valid N (listwise)</i>	15				

Sumber: hasil uji SPSS Versi 30 (2025)

Dari hasil tabel 2 Uji statistik deskriptif yang disajikan diketahui variabel Pendapatan Perkapita, nilai minimum 27.868.531,25, nilai maksimum 78.094.433,43, nilai rata-rata 51.098.495,09 dan standar deviasi 15.605.479,64. Apabila nilai rata-rata diatas dari nilai standar deviasi mengindikasikan data tersebut memiliki penyebaran yang relatif merata. Variabel Tingkat Inflasi, nilai terkecil 1,56, nilai terbesar 6,97, nilai rata-rata 4,1287 dan standar deviasi 1,64786 yang artinya nilai rata-rata diatas dari nilai standar deviasi menandakan distribusi data tersebut merata. Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan, nilai minimum 357.045, nilai maksimum 1.139.783,7, nilai rata-rata 680.860,92 dan standar deviasi 228.612,39. Sama seperti variabel lainnya, dimana nilai rata-rata diatas dari nilai standar deviasi mengindikasikan data tersebut tersebut merata.

Analisis Hasil Uji Normalitas

“Uji ini bertujuan mengetahui apakah data residual terdistribusi normal. Distribusi normal dibutuhkan sebab uji t dan uji F mengasumsikan residual mengikuti pola tersebut” (Ariyudi *et al.*, 2025). Peneliti memanfaatkan pengujian *one-sample Kolmogorov-Smirnov*. Patokan untuk mengambil keputusan uji ini yakni data dianggap berdistribusi normal apabila nilai probabilitas > dari 0,05. *Output* pengujian *Kolmogorov-Smirnov* tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Pengujian *Kolmogorov-Smirnov*

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		15
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.06406549
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.138
	<i>Positive</i>	.116
	<i>Negative</i>	-.138
<i>Test Statistic</i>		.138
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>		.200 ^d

Sumber: Hasil uji SPSS Versi 30 (2025)

Hasil pada uji normalitas ditampilkan ditabel 3, terlihat bahwa pada residual terdistribusi normal. Kondisi ini dapat diamati dengan melihat *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dimana nilainya lebih tinggi dibandingkan tingkat signifikansi 0,05.

Analisis Hasil Uji Multikolinearitas

“Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas” (Dasuki, 2022). Kriteria pengambilan keputusan didasari apabila jumlah VIF dibawah 10 dan jumlah *Tolerance* diatas 0,10, sehingga bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pendapatan Per kapita	.593	1.686
Tingkat Inflasi	.593	1.686

Sumber: Hasil uji menggunakan SPSS Versi 30 (2025)

Hasil pada uji multikolinearitas ditampilkan ditabel 4, memperlihatkan bahwa kedua variabel tidak menunjukkan adanya multikolinearitas, hal ini dibuktikan melalui jumlah *Tolerance* diatas 0,1 dan jumlah VIF dibawah 10.

Analisis Hasil Uji Autokorelasi

“Uji autokorelasi memiliki tujuan yaitu memastikan apakah didalam pada model regresi linear ada hubungan pada kesalahan pengganggu dalam periode saat ini (t) dengan kesalahan pengganggu dalam periode sebelumnya (t-1)” (Riftiasari, 2023).

Tabel 5. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Model Summary ^b	
				Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.981 ^a	.962	.956	.06920	1.853

Sumber: Hasil uji menggunakan SPSS Versi 30 (2025)

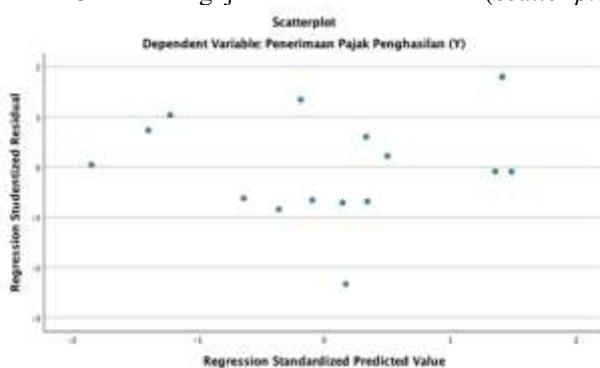
Mengacu pada tabel 5, persamaannya adalah:

$$\begin{aligned} (n ; k) &= (15 ; 2) \\ \text{Durbin-Watson (d)} &= 1,853 \\ \text{Durbin-Watson Lower (DL)} &= 0,9455 \\ \text{Durbin-Watson Upper (DU)} &= 1,5432 \\ 4 - \text{Durbin-Watson Lower} &= 4 - 0,9455 = 3,0545 \\ 4 - \text{Durbin-Watson Upper} &= 4 - 1,5432 = 2,4568 \\ \text{Hasil Kesimpulan} &= \text{Durbin Upper} < d < 4 - \text{Durbin Upper} \\ &= 1,5432 < 1,853 < 2,4568 \\ &= \text{Tidak terindikasi adanya Autokorelasi} \end{aligned}$$

Analisis Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian ini diarahkan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan varians residual antar observasi, yang kemudian dievaluasi melalui dua pendekatan, yakni pemanfaatan *Scatter Plot* serta penerapan Uji Glejser (Riftiasari, 2023).

Gambar 3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (*Scatter plot*)



Sumber: Hasil uji menggunakan SPSS Versi 30 (2025)

Pada Gambar 3 Uji Heteroskedastisitas, sebaran titik-titik data penelitian teramat tersebar acak diatas ataupun juga dibawah angka 0 dalam ordinat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa model yang diuji bebas dari heteroskedastisitas. Pada pengujian ini juga dilakukan dengan uji Glejser. Pengambilan keputusan yaitu data dinyatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas apabila signifikansi > dari 0,05. Adapun hasilnya disajikan pada tabel ini

Tabel 6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (Glejser)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.621	.767		.810	.434
Pendapatan Per kapita	-.029	.042	-.231	-.684	.507
Tingkat Inflasi	-.049	.030	-.544	-1.613	.133

Sumber: Hasil uji menggunakan SPSS Versi 30 (2025)

Tabel 6 diatas tersebut menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh dalam Pendapatan Per kapita, yakni $0,507 > 0,05$ dan Tingkat Inflasi dengan jumlah, yakni $0,133 > 0,05$. Maka simpulan yang didapat adalah penelitian bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Hasil Uji Regresi Linear Berganda

“Pengujian ini ditujukan guna melihat pengaruh secara simultan antara variabel pendapatan per kapita dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan” (Susila & Pradhani, 2022). Analisis dilakukan menggunakan model regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Yang mana:

Y, melambangkan penerimaan pajak penghasilan

X1, melambangkan pendapatan per kapita

X2, melambangkan tingkat inflasi

α , melambangkan konstanta

β_1, β_2 , melambangkan koefisien regresi

e, melambangkan error

Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-7.338	1.391		-5.274	<.001
Pendapatan Per Kapita	1.157	.076	1.111	15.252	<.001
Tingkat Inflasi	.172	.055	.228	3.133	.009

Sumber: Hasil uji menggunakan SPSS Versi 30 (2025)

Berdasarkan hasil Tabel 7 Uji Regresi Linear Berganda, persamaan yang terjadi yaitu:

$$Y = -7,338 + 1,157 (X_1) + 0,172 (X_2) + e$$

Implementasi daripada model tersebut adalah, Konstanta -7,338 mengindikasikan apabila variabel Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Inflasi bernilai nol, maka nilai Penerimaan Pajak Penghasilan adalah -7,338. Koefisien Pendapatan Per Kapita 1,157 bernilai positif. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada pendapatan per kapita mendorong peningkatan penerimaan pajak penghasilan sebanyak 1,157. Koefisien Tingkat Inflasi sebesar 0,172 juga bernilai positif. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada tingkat inflasi mendorong peningkatan penerimaan pajak penghasilan sebanyak 0,172.

Analisis Hasil Uji Signifikan T (Parsial)

“Uji-t dipergunakan guna menentukan signifikan terkait antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengujian diimplementasikan dengan uji t melalui perbandingan T_{Hitung} dengan T_{Tabel} pada $\alpha = 0,05$ ” (Ariyudi *et al.*, 2025).

Untuk mengetahui nilai T tabel maka digunakannya perhitungan rumus yaitu:

Tabel 8. Hasil Pengujian Signifikan T (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-7.338	1.391		-5.274	<.001
Pendapatan Per Kapita	1.157	.076	1.111	15.252	<.001
Tingkat Inflasi	.172	.055	.228	3.133	.009

Sumber: Hasil uji menggunakan SPSS Versi 30 (2025)

Hasil pada uji signifikansi parsial ditampilkan ditabel 8, diperoleh pada nilai T_{Hitung} untuk variabel Pendapatan Per Kapita yaitu 15,252 lalu untuk variabel Tingkat Inflasi sebesar 3,133. Nilai T_{Tabel} ditentukan dengan rumus:

Rumus T_{tabel}
: $t (a / 2; n - k - 1)$
: $0,05 / 2 = 0,025; 15 - 2 - 1 = 12$
 T_{tabel} : 2,178

Mendaras hasil tersebut bisa ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- Untuk variabel Pendapatan Per Kapita, nilai $T_{\text{Hitung}} > T_{\text{Tabel}}$ ($15,252 > 2,178$) pada tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan penolakan H_01 dan penerimaan H_1 , ini bermakna bahwa pendapatan per kapita secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- Untuk variabel Tingkat Inflasi, nilai $T_{\text{Hitung}} > T_{\text{Tabel}}$ ($3,133 > 2,178$) pada tingkat signifikansi $0,009 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan penolakan H_02 dan penerimaan H_2 , ini bermakna bahwa tingkat inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Analisis Hasil Uji Signifikan F (Simultan)

Dipergunakan untuk mendapatkan besar atau tidaknya pengaruh signifikan yang diberikan variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat (Aji *et al.*, 2021).

Tabel 9. Hasil Pengujian Signifikan F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.465	2	.732	152.971 <.001 ^b
	Residual	.057	12	.005	
	Total	1.522	14		

Sumber: Hasil uji menggunakan SPSS Versi 30 (2025)

Berdasarkan Tabel 9 Uji Signifikansi Simultan, diperoleh nilai fhitung sebesar 152,971. Nilai ftabel ditentukan dengan rumus:

Rumus ftabel
: $f (k; n-k)$
: $(2; 15-2)$
: $(2; 13)$
ftabel : 3,81

Karena fhitung ($152,971 > 3,81$) dan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$, ini menunjukkan bahwa H_03 ditolak serta pada H_03 diterima. Artinya, variabel bebas (Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Inflasi) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Analisis Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Kemampuan model untuk menginterpretasikan variasi variabel terikat telah diukur melalui koefisien determinasi (R^2), dimana bernali mulai dari 0 hingga 1; apabila nilainya rendah maka ragam variabel terikat dianggap terbatas, sedangkan bila mendekati 1 hampir seluruh data dinilai sesuai untuk memprediksi variabel terikat (Salawali, 2021).

Tabel 10. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 ^a	.962	.956	.06920

Sumber: Hasil uji menggunakan SPSS Versi 30 (2025)

Berdasarkan Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi (R^2), didapat nilai $Adjusted R Square$ 0,956. Temuan ini menunjukkan bahwasanya variabel Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Inflasi memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 95,6%. Adapun sisa dari variasi, yaitu 4,4% ($100\% - 95,6\%$), diterangkan oleh faktor lainnya yang berada diluar cakupan kajian ini.

Pengaruh Pendapatan Per kapita terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pendapatan per kapita terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji t dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Ini mengimplikasikan bahwa peningkatan pendapatan per kapita berimplikasi pada peningkatan penerimaan pada pajak penghasilan, sedangkan penurunan pendapatan akan menurunkannya. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pajak sebagai instrumen penting dan menekankan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi dan investasi, sehingga memperluas basis pajak penghasilan. Peningkatan pendapatan per kapita menandakan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemampuan membayar pajak masyarakat. Semakin tinggi rata-rata pendapatan, semakin besar pula pada potensi penerimaan pada pajak penghasilan. Oleh karenanya, peningkatan pendapatan per kapita secara langsung memperkuat basis pajak, meskipun terdapat penelitian lain yang menyatakan hasil berbeda. Temuan dari studi ini selaras dengan hasil kajian Isnanto *et al.* (2022) dimana ditunjukkan

adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, terdapat kajian lain seperti dari Salawali (2021) yang berpendapat berbeda, yakni pendapatan per kapita tidak memberikan pengaruh positif maupun signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Tingkat inflasi juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, dibuktikan lewat metode uji t dengan nilai $sig\ 0,009 < 0,05$. Artinya, kenaikan inflasi mendorong peningkatan penerimaan pajak, sedangkan penurunan inflasi menurunkannya. Kondisi ini mencerminkan bahwa sepanjang periode penelitian, dinamika harga (inflasi) tidak sampai menekan daya beli secara ekstrem, namun cenderung mendorong peningkatan nilai transaksi atau konsumsi. Ketika inflasi terjadi dan penerimaan pajak meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berhasil menjaga stabilitas inflasi atau memanfaatkannya untuk memperkuat basis pajak. Kenaikan penerimaan ini menerangkan keberhasilan sistem pengawasan pajak pemerintah terhadap wajib pajak ditengah dinamika harga. Temuan ini konsisten dengan riset yang dilakukan Monica & Kunawangsi (2023) yang menegaskan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, tidak sejalan dengan kajian, Anggraini (2022), dan Luciana & Ngadiman (2021) yang berpendapat bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh positif maupun signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Pendapatan Per kapita dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Secara simultan, pendapatan per kapita dan tingkat inflasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sebagaimana ditunjukkan oleh uji f dengan nilai fhitung $152,971 > f_{tabel}\ 3,81$ dan $sig\ 0,001 < 0,05$. Mengindikasikan bahwa kedua variabel memberikan kontribusi yang sangat kuat terhadap penerimaan pajak, karena keduanya memengaruhi daya beli, konsumsi dan aktivitas produksi yang menjadi sumber pajak. Peningkatan pendapatan per kapita yang diiringi dengan inflasi yang terkendali secara bersamaan mendorong basis pajak dan mendorong penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan. Hal ini mendukung peran pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mendaras pada hasil serta pembahasan, dapat ditegaskan bahwa pendapatan per kapita telah terbukti memberikan efek positif serta signifikan atas penerimaan pajak penghasilan melalui uji t, didapat hasil bahwa peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat berimplikasi pada bertambahnya potensi penerimaan pajak karena daya beli dan kemampuan membayar turut menguat. Tingkat inflasi pun ditemukan berpengaruh positif dan signifikan, dimana inflasi yang terkendali dipandang mampu menjaga kestabilan ekonomi, mendorong aktivitas produktif, serta berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Lebih lanjut, uji F memperlihatkan pendapatan per kapita dan inflasi secara simultan memiliki efek positif serta signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sehingga kombinasi keduanya memiliki peran krusial ketika menjelaskan dinamika penerimaan pajak di Indonesia serta patut dijadikan pertimbangan bagi perumusan kebijakan fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif sehingga pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkat dan pada akhirnya memperbesar potensi penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, pengendalian inflasi perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi, karena inflasi yang menjulang berpotensi laju transaksi masyarakat dan berefek buruk terhadap penerimaan pajak. Untuk memperkaya hasil kajian di masa mendatang, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel tambahan seperti tingkat pengangguran, kebijakan perpajakan, maupun jumlah wajib pajak supaya diperoleh cerminan yang lebih inklusif terkait indikasi yang memengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

REFERENCES

- Aji, A. W., Primastiwi, A., & Zidane, M. (2021). Pengaruh Peran Keluarga, Pengetahuan Perpajakan dan Motivasi Karir Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi dalam Memilih Konsentrasi Perpajakan (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Angk. *Media Akuntansi Perpajakan ISSN*, 6(2), 94–105. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5129>
- Amaludin, T. B. A., & Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 4(2). <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.162>
- Ambarwati, A. R., & Rispanty. (2025). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan

- Nilai (PPN) (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jateng II) Periode 2019-2023. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3256–3269. <https://doi.org/https://doi.org/10.62710/qfb7p030>
- Amelia, N., & Kunawangsih, T. (2023). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005 – 2020. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(2), 01–16. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i2.524>
- Anggraini, D. P. (2022). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. *Journal of Management and Economics Research*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.62866/jomer.v1i1.46>
- Ariyudi, B. W., Fionasari, D., & Azmi, Z. (2025). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 11(1), 22. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v1i1.2335>
- Ayem, S., Primastiwi, A., & Dwiartono, R. A. R. (2021). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 17–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5120>
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16 / Pj / 2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan , Jasa , Atau Kegiatan Wajib. *Esensi Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3), 137–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/esensi.v26i3.22>
- Isnanto, A., Suharno, & istiqomah. (2022). Pengaruh PDRB, Kesehatan, dan Kriminalitas Terhadap Pajak Penghasilan di Provinsi Jawa Tengah 2015-2019. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(15), 292–307. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1899>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Luciana, & Ngadiman. (2021). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Peningkatan Ptkp Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(3), 1342–1351. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14930>
- Mahendra, A., Pramita, E. H., Jannah, S. R., Zahara, D., & Gul, S. R. (2024). Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(1), 336–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14930>
- Monica, C. A., & Kunawangsih, T. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung Periode 2017 – 2021). *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 19–39. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1065>
- Prabowo, D., & Wijaya, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Kontribusi Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Berpendapatan Tinggi di Asia Timur dan Pasifik dengan Kualitas Peraturan Sebagai Pemoderasi. *Jurnalku*, 3(4), 495–506. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.665>
- Riftiasari, D. (2023). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Lapor SPT PPN Terhadap Penerimaan PPN. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(2), 436–444. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4577>
- Sabyan, M., Mainita, M., & Widayanti, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Investasi Pmdn Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Jambi. *Journal Development*, 10(1), 22–27. <https://doi.org/10.53978/jd.v10i1.192>
- Salawali, W. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kabupaten Banggai Periode Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Produktif*, 9(2), 30–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.56072/jip.v9i2.276>
- Septian, R., & Anis, I. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak : Analisis 6 Negara Di Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20838>
- Sinurat, R. P. P. (2023). Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia: Sebuah Analisis Deret Waktu. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 33–42. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.2490>
- Susila, M. R., & Pradhani, F. A. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia. *JIAKu Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 72–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i1.4996>